

Ketidakpastian Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta RUA PPPSRS dengan Berlakunya Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun = Legal Uncertainty for Notaries in the Making of the RUA PPPSRS Certificate with the Application of Permen PUPR Number 23/PRT/M/2018 and Pergub DKI Jakarta Number 132 Year 2018 with Undang - Undang Number 20 Year 2011 Concerning Flat Housing

Regina Bunga Vatiza, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920556438&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai judicial Review terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 yang diajukan oleh seorang notaris. Pengajuan hak uji materil ini dimohonkan atas dasar ketidakpastian hukum yang ditimbulkan di antara kedua peraturan pelaksana tersebut yang mana menjadi dilema bagi para notaris untuk mengikuti format mana yang akan diterapkan ketika membuat akta yang berkaitan dengan PPPSRS. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implikasi hukum atas penerbitan kedua peraturan tersebut terhadap notaris, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan MA Nomor 18/P/HUM/2019 dan terakhir adalah bagaimana kepastian hukum antara kedua peraturan tersebut untuk penerapannya kedalam akta Berita Acara RUA PPPSRS yang dibuat oleh notaris. Urgensi hukum dari penelitian ini adalah untuk meluruskan persepsi penegak hukum lain yang tidak memahami benar hakikat dan tugas notaris sesungguhnya, bahwa notaris bukan sekedar pekerja pencatat layaknya notulen, setiap akta yang dibuat oleh notaris memiliki tanggung jawab hukum yang mana dalam setiap pembuatannya diperlukan kepastian hukum dan harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian maka dari itu penting untuk melihat pertentangan dalam objek penelitian ini agar dapat diketahui terdapat dampak-dampak terhadap kinerja notaris untuk menghasilkan sebuah akta yang baik sebagai produk kepastian hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach). Dari rumusan tersebut didapatkan jawaban bahwa Notaris mendapatkan dampak atas ketidakpastian hukum yang diatur Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018, hal ini berkaitan dengan kewajibannya untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menuangkan sesuatu kedalam akta, memilih pilihan hukum mana yang akan digunakan. Pertimbangan hakim dalam putusan 18/PHUM/2019 tidak dapat disetujui dalam penelitian ini dikarenakan notaris tidak dapat diartikan hanya sebagai pencatat dan pembuat akta, tidak dapat diartikan semudah menuangkan tulisan kesepakatan ke dalam sebuah akta, karena setiap kata dan kalimat yang tertuang di dalamnya tidak dapat sembarang tulis atau hanya karena berdasarkan kesepakatan dapat langsung dituangkan. Perlu adanya sinkronisasi atas ketidakpastian hukum terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018.

.....This research discusses the judicial review on the regulation of the Minister of PUPR Number 23/PRT/M/2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018 which was submitted by a notary public. This filing for a judicial review is requested on the basis of legal uncertainty that arises between the two

implementing regulations which becomes a dilemma for notaries to follow which format will be applied when making a deed relating to PPPSRS. The problems raised in this research are the legal implications of the issuance of the two regulations to notaries, how the legal considerations by the judges in decision number 18 /P/HUM/2019 and how is the legal certainty between the two regulations for their application to the deed of RUA Minutes PPPSRS made by a notary. The legal urgency of this research is to straighten out the perception of other law enforcers who do not understand the true nature and duties of a notary, that a notary is not just a record keeping worker like a note taker, every deed made by a notary has a legal responsibility which requires legal certainty and must always apply the precautionary principle. Therefore it is important to look at the contradictions in the object of this research so that it can be seen that is there an impact on the performance of a notary to produce a good deed as a product of legal certainty. To answer this problem, a normative legal research method with an analytical approach is used. From this formulation, the answer is that the Notary has an impact on legal uncertainty regulated by Regulation of the Minister of PUPR Number 23/PRT/M/2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018, this is related to his obligation to always apply the principle of prudence in pouring things into deeds, choose which legal option to use. The judge's consideration in the decision 18/PHUM/2019 cannot be approved in this study because a notary cannot be interpreted only as a registrar and deed maker, it cannot be interpreted as easily as writing an agreement into a deed, because every word and sentence contained in it cannot just written or just because based on the agreement can be directly poured out. There is a need for synchronization of legal uncertainty with the Minister of PUPR Regulation Number 23 / PRT / M / 2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018.